

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGATASI
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
PEDESAAN DI DESA SABAH BALAU
KECAMATAN TANJUNG BINTANG
LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :
RIKO SETIAWAN
NPM. 1351010163**

Pembimbing Akademik : Madnasir, SE, M.Si



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu fenomena persoalan struktural dan multi dimensional, yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Kemiskinan di daerah pedesaan perlu diatasi salah satunya dengan program Pemberdayaan Nasional Masyarakat Pedesaan (PNPMP) sebagaimana yang saat ini dilaksanakan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Program ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dalam pengelolaannya diserahkan ke Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) desa Sabah Balau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan ? (2) apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, metode pelengkap adalah observasi dan dokumentasi, analisa data menggunakan teknik analisis kualitatif.

Temuan penelitian lapangan menunjukkan Pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui PNPM Pedesaan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan dalam bentuk : (1) Pengelolaan kegiatan ekonomi ibu-ibu (2) Memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas ekonomi (3) Peningkatan kegiatan melalui penyadaran

kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Faktor pendorong Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan melalui PNPM Pedesaan diantaranya : (1) dukungan pemerintah desa (2) Kemampuan manajerial UPK (Unit Pengelola Kegiatan) (3) Program tepat sasaran. Adapun faktor penghambatnya adalah : (1) pemahaman masyarakat yang menganggap dana PNPM adalah dana hibah dan (2) tidak meratanya SDM pengelola Unit Pelaksana Kegiatan.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl, Letkol.H.Endero Suratmin, UIN Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riko Setiawan
NPM : 1351010163
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 25 Agustus 2021

Penyusun



Riko Setiawan
NPM.1351010163



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan**

Nama Mahasiswa : **Riko Setiawan**
NPM : **1351010163**
Jurusan : **Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 November 2020

Pembimbing I,

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP.19750424 2002121001

Pembimbing II,

Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP. 198510302019031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP.19750424 2002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.”** disusun oleh : **Riko Setiawan, NPM :1351010163, Jurusan : Ekonomi Syari’ah,** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Kamis, 12 November 2020.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Heni Noviarita, M.S.I.**


(.....)

Sekretaris : **Moh. Fikri Nugraha Kholid, M.Pd.**


(.....)

Penguji I : **DR. Hi. M. Nasruddin, M.Ag.**


(.....)

Penguji II : **Madnasir, S.E., M.S.I.**


(.....)

Penguji III : **Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.**


(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kusnanto Abdul Ghofur, M.Si.
198008012003121001

MOTTO

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

Artinya : Tiada satupun yang melata di muka bumi, kecuali dipenuhi rizkinya oleh Allah ...(QS : Huud ayat 6).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Thoha Putra, Semarang, 1989, hlm 765.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati tak henti hentinya saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia dan barokahnya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada :

- Kepada kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Supran Zainal dan Ibunda Sarmila yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material, motivasi, dan do'a yang tak henti henti nya untuk keberhasilanku , hingga menghantarkanku meraih gelar sarjana.
- Kepada sahabat-sahabatku Taufik Hidayat, Agus Feriyanto, Richad Vernando, Rudiyanto, Imam Rifai, Arlita Trisdiani Putri, Bayu Ari Santoso, Wahyuni Andrefa, Suci Lestari, Ahmad Khoirudin, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 ku.
- Kepada teman- teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2013 yang tidak dapat kusebut kan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya, kalian adalah motivasi bagi ku.
- Kepada sahabat- sahabat KKN kelompok 1 Way Huwi angkatan 2015 yang selama 30 hari satu atap melewati suka duka bersama, semoga persaudaraan dan kekeluargaan kita tetap terjalin hingga nanti, Aamin.
- Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Riko Setiawan lahir di Kota Batu, pada tanggal 03 April 1995. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah kasih pernikahan Ayahanda Supran Zainal dan ibunda Sarmila.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

- Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Kota Batu, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, diselesaikan pada tahun 2007.
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTS Negeri Kota Batu, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, diselesaikan pada tahun 2010.
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Belitang 3, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, mengambil jurusan Bisnis Management, diselesaikan pada tahun 2013
- Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat Taufik dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan , kesehatan,dan Hidayah—ya. Tidak lupa pula Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Shalawat serta Salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nbi Muhammad SAW , Keluarga, Sahabat, dan Seluruh umat nya. Sehingga penulis Dapat Menyelesaikan Penelitain yang berjudul:

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN DI DESA SABAH BALAU, KECAMATAN TANJUNG BINTANG, LAMPUNG SELATAN”

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan , arahan, bimbingan serta do'a. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
- Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- Bapak Madnasir, S.E., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Bapak Madnasir, S.E., M.S.I dan bapak Suhendar, S.E., M.S.Ak.,Akt., masing masing selaku pembimbing I dan pe,bimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.


- Pihak pihak perangkat desa Sabah Balau yang bersedia membantu dan memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
- Orang tuaku, Adikku, Kakakku, dan semua keluarga yang selalu berdoa dan memberikan dukungan serta motivasi untuk keberhasilanku

Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebaikan dan selalu memberikan keberkahan dan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi akademik di jurusan ekonomi syariah UIN Raden intan Lampung. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Bandar Lampung, 21 April 2021



Riko Setiawan
1351010163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
M O T T O	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan penelitian	13
F. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ekonomi Islam	15
1. Pengertian Ekonomi Islam	15
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	16
3. Karakteristik Ekonomi Islam.....	16
B. Pemberdayaan Masyarakat	22
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	22
2. Tujuan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat	24
3. Kegiatan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	33
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Kelompok	36
C. Kemiskinan di Pedesaan	40

1. Pengertian Kemiskinan.....	40
2. Batasan dan Kategori Kemiskinan	48
3. Faktor Penyebab Kemiskinan.....	50
D. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan	55
1. Pengertian PNPM	55
2. Tujuan PNPM Pedesaan	56
3. Dasar Hukum dan Prinsip Dasar PNPM Pedesaan	56
4. Pendanaan dan Mekanisme Pencairan PNPM Pedesaan	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	61
B. Lokasi dan Sumber Data Penelitian.....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	63
D. Metode Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian	67
B. Analisis Data.....	74

BAB V KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Daftar Kepala Desa Sabah Balau 65
- Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga..... 66
- Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur..... 67
- Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 67
- Jumlah sekolah di Desa Sabah Balau..... 67
- Jumlah Umat BerAgama Desa Sabah Balau 69
- Mata PencaharianPenduduk Desa Sabah Balau 70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini “**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN**” untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi, diperlukan penegasan judul sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.³

Berdasarkan pengertian di atas, pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

²Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ar Ruzz Media, Jakarta, 2007, hlm 42

³Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT Pusaka Cisendo, Jakarta, 1996, hlm 145

Masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah warga desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan yang aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri bidang ekonomi.

2. Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan, diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁴

Kalimat mengatasi kemiskinan diartikan sebagai sebuah upaya dalam menanggulangi keterbatasan seseorang dalam bidang ekonomi yang disebabkan terbatasnya kemampuan seseorang dalam memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya.

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.⁵

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMP) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.320

⁵Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI PERDESAAN*, penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta, 2018, hlm 58.

pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari. Disamping juga terdapat tujuan khusus yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat perdesaan, kapasitas masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta meningkatkan tata pemerintahan lokal dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.⁶

4. Desa Sabah Balau

Desa Sabah Balau merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang mendapatkan bantuan dana PNPM Pedesaan sejak tahun 2018.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini adalah program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2020 – 2021.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah :

1. Judul skripsi tersebut dipandang perlu untuk diangkat guna mengetahui secara jelas bagaimana efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam upaya mengatasi kemiskinan, program tersebut dianggap sebagai unggulan Program Nasional Pemerintah yang diyakini efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Perlu di lakukan penelitian secara ilmiah, karena kemiskinan masyarakat di lingkungan pedesaan bervariasi penyebabnya, namun yang paling mencolok adalah tingkat pendidikan dan kebudayaan yang secara turun temurun membelenggu masyarakat tersebut.

⁶*Ibid.*, hlm 59.

3. Penelitian ini didukung dengan literatur, sarana, waktu, dan biaya yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga penulis yakin dan optimis dapat menyelesaikannya dengan baik.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan berhubungan erat dengan masalah ekonomi, sosial dan budaya. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Apabila dilihat dari pola hubungan sebab akibat, orang miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit didalam lingkaran ketidakberdayaan, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat yang tingkat kehidupannya berada dibawah standar dalam aktivitasnya tetap menjalani kegiatan seperti layaknya orang-orang yang berkehidupan lebih baik.

Hal yang membedakan orang-orang miskin dengan orang-orang yang berkehidupan lebih baik adalah tingkat pendapatan mereka yang jauh lebih kecil dan tidak cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup yang lebih layak. Selain itu dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh ukuran miskin ini adalah rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat, umumnya yang tidak dapat mengimbangi jumlah kebutuhan pokoknya.

Menurut Emil Salim yang dimaksud dengan kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Atau dengan istilah lain kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.⁷

Oleh karena itu masalah kemiskinan yang terjadi di pedesaan sangat kompleks, disamping pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, secara cepat atau lambat sangat berpengaruh terhadap masalah kesempatan dan kompetisi kerja diantara masyarakat yang ada.

⁷ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 344

Sebagai akibat dari kesenjangan dan terbatasnya lapangan kerja dengan angkatan kerja, maka akan mengakibatkan menumpuknya angkatan kerja yang produktif setiap tahunnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan masalah dalam mencari jalan keluar guna memecahkan masalah penyaluran tenaga kerja. Selain itu karena kualitas dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu masih rendah, sehingga menyebabkan sulitnya mengembangkan sumber daya manusia yang berhubungan dengan keterampilan kerja.

Disisi lain adalah masih terdapat pula anggota masyarakat yang pendidikannya tergolong rendah, sehingga cenderung mudah mengakibatkan terjadinya proses kemiskinan. Selain itu kondisi lingkungan tempat tinggal sangat menentukan kehidupan seseorang, sehingga ketika lingkungannya dapat menghambat kepada si miskin untuk berkreatifitas dalam mengedepankan tujuan hidup yang lebih baik, namun disini masyarakat setempat justru tidak menampik masalah sosial yang seharusnya ikut dalam mensejahterakan kehidupan bangsa, yakni dengan rasa saling tolong-menolong dan saling melengkapi antara satu sama lainnya.

Kondisi masyarakat semacam ini cenderung menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, lantaran rendahnya kemampuan untuk dapat mencerna, menerima ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kebutuhan dalam pemenuhan kehidupan. Karena yang dikedepankan oleh masyarakat semacam ini yakni yang penting besok bisa makan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional pada hendaknya diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang berarti menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia agar mampu melanjutkan pemenuhan guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Hasil data BPS tahun 2019 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami angka kenaikan setiap

periode mencapai 39,05 juta jiwa (17,75 %) meningkat 3,95 juta jiwa dari angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa.⁸ Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan maka permasalahan sosial lainnya sebagai dampak kemiskinan juga bertambah. Seperti, masalah lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat, dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Berkenaan dengan persoalan-persoalan di atas, maka upaya pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan.

Strategi pembangunan yang ditetapkan tidak memberikan sumbangan yang banyak bagi kesejahteraan rakyat miskin. Sebaliknya, malah membuat mereka semakin sengsara. Sejalan dengan pemikiran itu, Korten mengemukakan, selama tahun 1980-an terdapat tiga krisis global yang terpatrit dalam kesadaran umat manusia. Krisis itu adalah kemiskinan, kegagalan lingkungan hidup, dan tindak kekerasan sosial.⁹ Namun, jika kita perhatikan ternyata asal muasal dari dua krisis global tersebut bersumber dari kemiskinan. Meskipun telah banyak upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan khususnya di Negara Dunia Ketiga, namun kemiskinan tetap saja merupakan masalah utama di negara dunia ketiga hingga saat ini.

Indonesia merupakan Negara Dunia Ketiga yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Kepadatan itupun rentan dengan permasalahan yang mengiringinya. Diantaranya adalah masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di Negeri ini. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya angka kemiskinan dari masa kemasa. Terlebih pasca krisis multidimensional yang berkepanjangan yang melanda bangsa Indonesia ini. Permasalahan kemiskinan di Indonesia saat ini sudah sangat mendesak untuk ditangani.

Lain halnya dengan masyarakat desa, kemiskinan yang ada dimasyarakat perkotaan variabelnya lebih kompleks. Karena masyarakat perkotaan lebih mengarah pada mentalitas individualistik,

⁸BPS, *Indonesia dalam Angka*, Jakarta, 2018, hlm 4.

⁹David Korten, *Menuju Abad 21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 19.

persaingan yang tidak terpandu, yang besar kecenderungannya akan menambah dalam jurang pemisah antara kelompok yang berkemampuan dengan kelompok yang tidak berkemampuan. Maka akan muncul konflik yang terjadi akibat seleksi alam (*survival of the fittes*), yakni yang kuat akan tetap bertahan hidup, dan yang lemah akan tersisihkan, sehingga kelompok yang tidak berkemampuan akan kalah bersaing dan menjadi tenaga kerja dengan upah yang tidak sewajarnya. Indikator dari semua itu disebabkan karena kepadatan jumlah penduduk pendatang yang berbondong-bondong masuk ke kota lebih cepat dari kesanggupan industri untuk menampung tenaga kerja.

Ironisnya korban akibat dari persaingan tersebut adalah masyarakat lokal, sebab pemilik modal dikuasai oleh pihak asing yang dibantu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah setempat dan para borjuis lokal yang mencoba meraup keuntungan dari tenaga kerja lokal tersebut seperti yang terjadi pada masa kolonialisme sebagai bukti historis.¹⁰

Kemiskinan merupakan suatu fenomena persoalan struktural dan multi dimensional, yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan muncul dalam berbagai bentuknya, diantaranya adalah: (1) Dimensi politik yang sering muncul karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. (2) Dimensi sosial yang sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin kedalam institusi sosial yang ada, serta terinternalisasikannya budaya kemiskinan, termasuk didalamnya pengikisan budaya kemiskinan yang sudah melekat pada mentalitas masyarakat Indonesia yang merusak kualitas manusia serta etos kerja mereka. (3) Dimensi lingkungan yang sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,

¹⁰Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, Utama, 2000, hlm 66.

sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta pemukiman. (4) Dimensi ekonomi yang muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan. Sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai batas yang layak, dan (5) Dimensi aset yang ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*) peralatan kerja, modal dana, perumahan dan pemukiman, dan lain sebagainya.¹¹

Dari dimensi-dimensi diatas kemiskinan dapat digolongkan kedalam dua kategori, yaitu; (1) *Kemiskinan alamiah*, maksudnya kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. (2) *Kemiskinan struktural atau buatan*, yakni kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang memihak kepada kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang menyudutkan pihak lain.¹²

Sebenarnya upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, terutama pasca krisis yang menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan tersebut, bila kita amati terdapat pelajaran berharga dan mungkin sebagai penyadaran bagi para penyelenggara negara, bahwa kebijakan dalam melakukan pembangunan nasional pada umumnya, dan program penanganan kemiskinan pada khususnya yang menempatkan warga miskin sebagai objek pembangunan perlu dikoreksi. Artinya, bahwa dalam upaya penanganan kemiskinan perlu lebih melibatkan penduduk miskin sebagai subjek pembangunan, dan diharapkan penanganan kemiskinan nantinya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Maka dari itu perlu adanya konsep pemberdayaan (*empowerment*) bagi masyarakat miskin. Konsep pemberdayaan merupakan strategi pembangunan yang digunakan dalam paradigma

¹¹Sonny H. Kusuma, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.17, No. 2, Juni 2002, Akatiga, Bandung, 2002, hlm, 178.

¹²Wardi Bachtiar, *Pengaruh Etos Kerja Terhadap Status Sosial Ekonomi Muslim Sunda Pemukiman Daerah Kumuh di Kota Madya Bandung*, Disertasi Unpad, Bandung, 1995, hlm 14.

pembangunan yang berpusat pada manusia. Konsep ini dimulai sekitar 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an. Pada awal gerakan moderen, konsep pemberdayaan ini bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Terkait dengan itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Penanganan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat yang menjadikan orang miskin sebagai subjek pembangunan dalam menanggulangi masalahnya merupakan hal yang belum banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Hal inilah yang menarik

¹³ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, HUP, Bandung, 2004, hlm. 1

perhatian dan minat penulis untuk memecahkannya melalui proses penelitian yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam perubahan sosial ekonomi. Walaupun telah banyak pakar yang meneliti masalah kemiskinan, namun objek penelitian sebagai sasarannya adalah penanggulangan kemiskinan dipedesaan melalui penguatan partisipasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat yang berlokasi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Program atau kegiatan PNPM Mandiri yang ada di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan secara umum tertuang dalam program yang dikembangkan oleh desa Sabah Balau. Akan tetapi untuk sampai ke tingkat dusun atau RT, desa Sabah Balau membentuk unit terkecil. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah penyaluran, koordinasi serta evaluasinya. Salah satu bagian yang mengelola program atau kegiatan itu adalah UPK (Unit Pengelola Kegiatan). UPK adalah gugus tugas atau unit pelaksana teknis dari setiap dusun, yang akan menjalankan pengelolaan seperti menginventarisir jumlah kemiskinan, sarana fisik

dan lainnya yang berkaitan dengan potensi kemiskinan suatu daerah, sehingga kemudian akan ditetapkan cara penyaluran dananya serta merencanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang telah dibuat oleh Desa sebagai pemegang dana PNPM mandiri. Tugas pokok dari UPK ini ini sebagaimana tertuang dalam rincian tugas di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut: (1) Mengelola Pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi warga miskin. (2) Mengelola pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan sarana dan prasarana lingkungan bagi warga miskin. (3) Mengelola pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan sosial.¹⁴

Berdasarkan data statistik desa Sabah Balau Program PNPM Pedesaan yang sudah berjalan diantaranya : Penyediaan dan perbaikan pasarana dan sarana lingkungan permukiman dan ekonomi serta kegiatan padat karya, Pada program kerja ini telah dilakukan atau dicanangkan sebagai program tahunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dipedesaan di desa Sabah Balau meliputi kegiatan lingkungan dan fisik, kegiatan ekonomi, dan sosial yang dibagi kedalam tiga catur wulan. Untuk *catur wulan pertama* program PNPM Mandiri lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin, seperti peningkatan kualitas pemukiman bagi masyarakat miskin, jalan-jalan, selokan, dan pengadaan air bersih. Selain itu juga menitik beratkan pada kegiatan dana pinjaman bergulir warga untuk usaha produktif, yakni berupa kredit tanpa jaminan dengan imbalan jasa 1,5 % perbulan yang dibagi kedalam beberapa KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan), jumlah KSPP minimal 10 orang dan maksimal 15 orang.¹⁵

Pada bidang sosial program PNPM Mandiri di desa Sabah Balau melakukan program konsolidasi dengan warga sebagai media bagi warga miskin, apabila ada warga yang mendapat musibah, seperti salah seorang anggota keluarganya meninggal maka keluarga tersebut mendapat tunjangan dari sisa dana pinjaman bergulir. Bahkan PNPM juga mengadakan program untuk keluarga miskin yang mempunyai

¹⁴Heriyansyah, Kaur Pemerintahan Desa Sabah Balau, *wawancara*, tanggal 08 Agustus 2020

¹⁵*Data Dokumentasi* Desa Sabah Balau tahun 2020

salah satu anggota keluarga yang sudah usia jompo (50 tahun keatas). Berdasarkan data dari UPK jumlah KK miskin jompo ada sekitar 281 orang. Sedangkan jumlah KK miskin jompo yang sudah mendapat santunan sosial dari bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah 72 orang (penyaluran Bulan Juli 2020).¹⁶

Untuk *catur wulan kedua* program kegiatannya hampir sama, tetapi dalam program peningkatan kualitas pemukiman masyarakat miskin dan pengadaan air bersih sudah tidak dilakukan, karena sudah dilakukan pada program catur wulan I. Sedangkan untuk catur wulan III hanya ada dua program yakni Program peningkatan ekonomi keluarga miskin dengan agenda kerjanya adalah pencairan dana pinjaman bergulir untuk usaha produktif bagi masyarakat miskin dan program penguatan masyarakat atau warga miskin, serta melakukan evaluasi tahunan dari seluruh program kerja. Sistem pelaporan ada yang berskala 1 bulan sekali, ada yang tiap 3 bulan sekali, dan juga ada yang 1 tahun sekali.¹⁷

Desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan sangat tepat untuk dijadikan daerah penerima bantuan PNPM mandiri Pedesaan, karena salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin yang ada di wilayah desa Sabah Balau adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, kelembagaan lokal, dan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu, serta tidak dimilikinya keterampilan usaha bagi warganya. Oleh karena itu setelah digulirkannya program PNPM Mandiri Pedesaan timbul pertanyaan apakah program ini efektif dilakukan dan diterima baik oleh masyarakat setempat untuk menanggulangi kemiskinan, serta berpengaruh terhadap perubahan ekonomi masyarakatnya ataukah tidak.

¹⁶Heriyansyah, Kaur Pemerintahan Desa Sabah Balau, *wawancara*, tanggal 08 Agustus 2020

¹⁷Heriyansyah, Kaur Pemerintahan Desa Sabah Balau, *wawancara*, tanggal 08 Agustus 2020

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan untuk memahami Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui program PNPM Pedesaan dalam kaitan fenomena sosial dan pandangan pelakunya. Penelitian kualitatif menjadi dasar bagi penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan ilmiah. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengandalkan manusia sebagai instrument penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk menjeiskan dan mengarahkan sasaran penelitian sebagai “usaha menemukan teori, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membahas studi dengan fokus rancangan penelitian disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian).¹⁸

Untuk mengkaji lebih mendalam tentang suatu fenomena sosial di masyarakat, dalam penelitian kualitatif diperlukan batasan masalah yakni Program PNPM Pedesaan di desa Sabah Balau dan Kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakannya program PNPM Pedesaan tahun anggaran 2019-2020.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan ?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan ?

¹⁸Maleong Lexy, J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 30.

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bahan evaluasi bagi peningkatan program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Sabah Balau terutama dalam bidang ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di desa Sabah Balau
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemerintah, akademisi dan pihak terkait dalam hal penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui prohran PNPM Mandiri.

BAB II

EKONOMI ISLAM DAN PNPM PEDESAAN

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi adalah pengetahuan tentang pariwisata dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.¹⁹

Ekonomi Islam : mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian, cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah, siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al Qur'an dan As Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.

Sementara menurut para ahli lainnya mendefinisikan sebagian ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.²⁰ Ekonomi Islam dapat juga diartikan sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga. Norma-norma itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota rumah tangga perekonomian ini

¹⁹Ahmad Muhammad Al Asal dan Pathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, CV. Pustaka Setia, 1999, hlm 139 - 145

²⁰*Ibid*, hlm. 10

bertujuan menciptakan kehidupan sejahtera di dunia dan keberuntungan dan mendapatkan ridho Allah di akhirat.²¹

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.²²Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai- nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah, dan ma'ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Perekonomian keluarga muslim mengandung beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan sistem perekonomian keluarga non muslim diantara keistimewaan yang terpenting adalah sebagai berikut :

²¹Muhammad Antonio, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Penerbit Buku Andalan, Jakarta, 1998, hlm 48

²²Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Gema Insani Perss, Jakarta, 2002,hm.17

a. Memiliki nilai ibadah

Ekonomi Islam berdiri di atas nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spiritual mereka. Diantaranya yang terpenting menyembah Allah, bertaqwa, mengembangkan keturunan serta keyakinan bahwa harta itu milik Allah oleh karena itu setiap anggota keluarga harus bekerja dan mencari nafkah sesuai dengan syari'at sebagaimana firman Allah berikut ini. Al Hadid : 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu telah menguasainya.²³

Berdasarkan ayat di atas, Allah menghendaki agar umat Islam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mau menafkahkan sebagian harta yang diperoleh dari hasil usahanya yang pada hakikatnya Allah lah yang memberikannya.

b. Berakhlak mulia

Perekonomian rumah tangga muslim dapat berdiri tegak atas dasar kepercayaan kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan sabar. Seorang suami harus percaya akan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya dan yakin bahwa istri dan anak-anaknya berhak atas harta miliknya.

Demikian juga kepercayaan seperti itu harus ada pada diri seorang istri. Istri tidak boleh boros terhadap harta suami sebab ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya terhadap harta suami.

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV Mahkota, Surabaya, Edisi Revisi, 1996, hlm 459

Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (متفق عليه)

Artinya : Dari Ibnu Umar ra ia berkata : Rasulullah SAW bersabda Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suami dan rumah tangga akan dimintai pertanggung jawabannya. (mutafaqun Alaihi).²⁴

c. Bersifat pertengahan dan seimbang

Perekonomian keluarga muslim berdiri atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara seperti pertengahan dalam pengaturan harta dan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga terkesan kikir. Keseimbangan antara usaha dan pengeluaran dapat menstabilkan neraca rumah tangga dan dapat menjauhkan rumah tangga dari lilitan hutang. Jika pengeluaran melebihi pemasukan modal akan habis dan keluarga akan terjerumus pada mala petaka hutang sehingga yang ada hanyalah kesedihan dan kebingungan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas jelaslah bahwa perekonomian rumah tangga muslim memiliki keistimewaan tertentu. Nilai-nilai akhlak dan aqidah yang dimiliki para anggotanya mempunyai pengaruh besar bagi perekonomian ini.

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan keistimewaan perekonomian rumah tangga muslim adalah :

- a. Perekonomian rumah tangga muslim merupakan perekonomian yang didasarkan pada keimanan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur rezeki manusia. Perekonomian rumah tangga muslim menganggap pemenuhan kebutuhan material sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan spiritual, sebab tujuan kebutuhan spiritual yang terakhir adalah menyembah Allah dan mendapatkan keuntungan di surga dengan dapat berkumpul bersama anggota keluarga lainnya.

²⁴Imam Abu Zakariya Yahya, *Op.Cit.*, hlm 239.

- b. Perekonomian rumah tangga muslim itu berdiri di atas dasar nilai-nilai akhlak, seperti sifat terpercaya, jujur, taat, menerima apa adanya, sabar, menerapkan persaudaraan serta berbuat baik kepada orang lain. Nilai-nilai akhlak inilah yang akan dapat membuat rumah tangga mereka menjadi tetap dan stabil.
- c. Perekonomian rumah tangga muslim itu berpegang pada prinsip pencarian rizki dan nafkah yang halal dan baik hal itu merupakan ibadah yang bertentangan dengan prinsip penghalalan atas segala cara.
- d. Perekonomian rumah tangga muslim itu menggunakan azas keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam pemenuhannya. Dengan demikian, perekonomian ini tidak mengabaikan ibadah di dalam mencari nafkah dan tidak mengabaikan upaya mencari nafkah dalam rangka ibadah. Selain itu, perekonomian ini pun menyeimbangkan harmonisasi antara tuntutan kehidupan dunia dan akhirat, tuntutan rumah tangga, masyarakat, serta dakwah Islam, serta memiliki keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
- e. Perekonomian rumah tangga muslim mengutamakan kebutuhan primer di atas kebutuhan sekunder dan pelengkap di dalam pengeluaran. Hal ini dilakukan agar dapat terhindar dari gaya hidup mewah dan berfoya-foya.
- f. Perekonomian keluarga muslim itu memelihara kelangsungan hidup dan hak-hak ekonomi generasi yang akan datang dengan mementingkan masa sekarang saja.
- g. Perekonomian rumah tangga muslim itu memberikan beberapa hak kepada wanita untuk menjalankan roda perekonomian. Di samping memiliki hak mencari ilmu, wanita pun memiliki hak bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syari'at.

Adapun dalam lingkungan ekonomi Islam sudah tentu lain ketentuannya karena bila kegiatan hanya bertujuan mendapatkan

keuntungan material saja, sesungguhnya ia tidak mempunyai tujuan sebagai cita-cita yang sebenarnya keuntungan material itu hanyalah sebagai perantara bagi tujuan yang lebih besar dan cita-cita yang lebih luhur, yaitu memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan realisasi dari khilafah di bumi Allah ; karena percaya bahwa manusia pasti akan terdiri dari hadapan penciptanya untuk mempertanggung jawabkan khilafat ini, dan apa yang telah dibaktikan kepada-Nya.

Ada perbedaan besar antara mendapatkan keuntungan material sebagai tujuan dan cita-cita, dengan hanya sebagai perantara dari tujuan yang lebih besar dan cita-cita yang lebih luhur, yakni memakmurkan bumi dan mempersiapkannya bagi kehidupan insani, serta merealisasikan kesejahteraan hidup dan harta kekayaan untuk seluruh manusia.

Jadi cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah menciptakan persaingan monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi penemuan manusia. Akan tetapi, cita-citanya adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah SWT.

Sistem-sistem ekonomi itu berbeda satu sama lainnya terhadap dua kepentingan ini. Ekonomi kapitalisme memandang individu sebagai poros dan tujuan dari semua yang ada. oleh sebab itu ekonomi kapitalisme sangat mementingkan kepentingan individu dan mendahulukannya dari kepentingan orang banyak secara keseluruhan. Inilah rahasia yang dianugerahkan oleh kebenaran yang sempurna dan mutlak dalam soal hak individu dan kemerdekaan ekonomi, alasan sistem kapitalisme dalam sikapnya terhadap individu ini bahwa di sana ada pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak dan individu-individu ketika berusaha merealisasikan kepentingan-kepentingan

khusus, sebenarnya pada saat yang sama mereka merealisasikan kepentingan orang banyak.

Tak seorangpun menyangkal pentingnya studi ekonomi saat ini pertarungan yang terjadi di antara kedua blok Timur dan Barat disebabkan oleh sebab-sebab ekonomi. Problem pokok yang merepotkan adalah apa yang diistilahkan dengan dunia ketiga, yaitu terdiri atas negara-negara Asia, dan Amerika Latin, yakni problem kemunduran ekonomi dan perlunya mempertumbuhkan ekonomi.

Suatu hal yang tak dapat diragukan adalah ekonomi Islam memainkan peranan utama dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi dalam dunia Islam. Pertumbuhan ekonomi di negara manapun dapat menjadi sempurna bila sesuai dengan rencana yang telah dipelajari. Akan tetapi, para ekonomi pada umumnya berpendapat bahwa keberhasilan pertumbuhan takkan tercapai hanya dengan mempersiapkan rencana saja atau mengikuti pelaksanaannya, dan adanya penguasaan negara atas bidang-bidang pokok dari ekonomi bangsa. Masalah pokok yang sangat diperlukan adalah ikut sertanya seluruh bangsa serta semua individunya dalam merealisasikan pertumbuhan. Masing-masing dari mereka melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan dengan sempurna dan menjauhkan diri dari semua bentuk penyelewengan dan eksploitasi.

Di sini ekonomi Islam dapat memainkan peranan yang tak dapat dimainkan oleh ekonomi manapun. Maksudnya, dalam lingkungan ekonomi Islam andil dalam rencana pertumbuhan dapat menjadi lebih aktif dan lebih jauh dari penyelewengan maupun eksploitasi. Sebab andil ini dapat saja berubah menjadi semacam ibadah. Dan ikut bersama andil itu, alat pengawasan yang lebih kuat dari pada alat yang ada di semua negara, yaitu takut kepada Allah dan perhatian terhadapnya, yang bersemayam di dalam hati nurani individu muslim.

Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi hasil penemuan manusia adalah ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang mencakup akidah dan syari'atnya. Hubungan ini

memberi kesempatan kepada kegiatan ekonomi untuk bersifat ibadah dan menumbuhkan kontrol yang sebenarnya dari dalam diri muslim sendiri dan bukan dari luar.

Dari sinilah tampak pentingnya ekonomi Islam dan peranannya dalam hubungannya dengan dunia Islam. Ia merupakan jalan yang akan mengikatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dalam keimanan.

Adapun peranan lain yang masih mungkin dapat dilaksanakan oleh ekonomi Islam, yaitu lapangan penerapan dalam dunia Islam sendiri, yakni “melaksanakan penerapan ekonomi Islam sampai terwujudnya kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia. Kesatuan ekonomi ini merupakan jalan masuk yang sangat penting ke arah kesatuan politik”.²⁵

Perekonomian rumah tangga muslim membedakan tanggung jawab atau beban keuangan laki-laki dari wanita sebab setiap pihak sudah memiliki hak masing-masing. Dalam kegiatan ekonomi sebagai hukum yaitu hukum Islam yang merupakan mu’jizat yang kekal dan abadi dalam arti sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia disegala bidang termasuk bidang ekonomi manusia yang memberikan aturan dan pedoman ekonomi.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan.

²⁵*Ibid*, hlm. 37-39

Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.²⁶

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.²⁷

Menurut Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁸

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas, sehingga yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai.²⁹

²⁶Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, 2002, hlm 19.

²⁷Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, hlm 21.

²⁸Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT Pusaka Cisendo, Jakarta, 1996, hlm 145

²⁹Suprpto (dkk), *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Modal Sosial dan Potensi Ekonomi Lokal dalam Pengentasan Kemiskinan Pasca*

Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu proses di mana masyarakat yang miskin sumber daya didukung keberadaannya dan dibantu agar mampu meningkatkan keberdayaannya secara mandiri. Proses ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan dari kelompok masyarakat yang miskin sumber daya tersebut, sehingga mereka mampu berpartisipasi dan mengoptimalkan akses sumber daya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.³⁰

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Tujuan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan.³¹

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat,

Program PNPM Mandiri, Universitas Jenderal Soedirman - INDHILLCO, Purwokerto, 2018, hlm 4

³⁰*Ibid.*, hlm 6.

³¹Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 35.

melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.

Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat ?. Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sunyoto Usman untuk melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat diperlukan transformasi peranan Pemerintah daerah dari inisiator menjadi fasilitator. Perubahan paradigma baru ini ditetapkan dalam strategi pembangunan yang ditawarkan, antara lain: (1). Memperkuat, memperbaiki dan menciptakan kapasitas kelembagaan produksi, pendapatan dan pengeluaran; (2). Meningkatkan dan melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (3). Mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan (4). Meningkatkan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan manusia (*capacity building*) yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat melalui strategi pemberdayaan.³²

- a. Strategi 1 : Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini,

³²*Ibid.*, hlm 56-58.

upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

b. Strategi 2 : Program Pembangunan Pedesaan

Pemerintah di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan.

Penjelasan macam-macam program sebagai berikut: Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian.

Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja

dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor. Selanjutnya program strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

J. Nasikun (dalam Jefta Leibo, 1995), mengajukan strategi yang meliputi : (1) Strategi pembangunan gotong royong, (2) Strategi pembangunan Teknikal – Profesional, (3) Strategi Konflik, (4) Strategi pembelotan kultural. Dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.³³

Strategi pembangunan Teknikal – Profesional, dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen-agen pembaharuan sangat penting. Peran

³³J. Nasikun, *Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, dalam Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hlm 19-22.

yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut.

Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara –cara yang lebih kreatif sehingga hambatan–hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir. Strategi Konflik, melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

Strategi pembelotan kultural, menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesame dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis-relegius. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang betrkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya gotong royong dalam pembangunan di desa dan kalurahan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang

diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan (*enabler*), perantara (*mediator*), pendidik (*educator*), perencana (*planer*), advokasi (*advocation*), aktivis (*activist*) dan pelaksana teknis (*technisi roles*) (lihat Pasal 10 Permendagri RI No.7 Tahun 2007). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Permendagri tersebut, tampaknya dalam strategi pemberdayaan masyarakat dapat dinyatakan sejalan dengan Strategi pembangunan Teknikal – Profesional.³⁴

Strategi Menghadapi Globalisasi. Pemberdayaan masyarakat dalam era globalisasi melibatkan segenap pihak dan dukungan kebijakan dari atas yang mendukung pertumbuhan dari bawah. Di sektor perdagangan seperti yang dilakukan walikota Solo, Joko Widodo yang juga berjiwa entrepreneur itu; beliau mengembangkan pasar tradisional yang di dukung dengan kebijakan yang kondusif yang memudahkan pelaku ekonomi kreatif dan tidak menerima pasar modern masuk ke wilayahnya. Dalam kegiatan itu ia tidak menggunakan dana bantuan (asing), akan tetapi menggunakan potensi wilayahnya dan percaya pada kekuatan sendiri.

Di sektor pertanian, Indonesia adalah Negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah dan dengan profesi petani cukup besar. Untuk itu dapat dikembangkan berbagai konsep seperti agropreneurship dan technopreneurship. Agropreneurship adalah berbagai upaya yang dilakukan dalam memanfaatkan peluang industri agribisnis.

E Gumbira Sa'id menyatakan, untuk hal ini para petani dan calon agropreneur harus memiliki cara berpikir dan bertindak sebagai wirausahawan. Pemikiran wirausaha akan

³⁴Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Fokus Media, Bandung, 2009, hlm 34.

membantu mereka mengembangkan kesadaran terhadap berbagai peluang bisnis yang terbuka luas, dan keyakinan untuk membangun keberhasilan untuk mencapainya. Selain itu perlu didukung oleh riset.

Menurut Prof E. Gumbira Sa'id :

Para petani di bagian selatan Taiwan, terutama Kaoshiung. Mereka adalah golongan manusia terkaya yang kemungkinan besar jati dirinya adalah petani. Begitu juga dengan petani di Provinsi Oita, Jepang, yang petaninya berhasil hidup dengan sejahtera. Mereka memiliki gerakan pemberdayaan pertanian dan hasil alam yang sangat menunjang bagi kemajuan negaranya. Hal yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan menjadi agropreneur salah satunya adalah melakukan riset dengan mengumpulkan berbagai rujukan tentang cerita keberhasilan dan kiat-kiat para agropreneur terdahulu.³⁵

Strategi pemberdayaan masyarakat lainnya adalah dengan melakukan green technopreneurship seperti pengembangan kampoeng smart di dusun Rejosari, kabupaten Sragen. Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan adalah yang menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, yaitu pola pemberdayaan yang sifatnya bottom-up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Strategi pemberdayaan masyarakat utamanya juga pada kualitas SDM. Pendidikan masyarakat harus

³⁵Hidayat, S. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : sebuah rekonstruksi konsep CBD.PT*. Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm 97.

ditingkatkan dalam membangkitkan kesadaran akan nasionalisme untuk mulai perubahan dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dilakukan mulai dari sekarang.

Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan proses pemberdayaan, itu :

- a. Konsep pemberdayaan hendaknya dapat dipahami oleh pemimpin
- b. Terdapat perubahan budaya (culture change), baik pada budaya organisasi dan perusahaan
- c. Pemimpin harus memiliki kesadaran dalam dirinya, bahwa dalam implementasi dari konsep-konsep pemberdayaan, pada akhirnya akan terjadi perubahan peran (role change), yang berimbas pada berkurangnya peran mereka
- d. Masyarakat harus siap merubah dirinya dan menghilangkan hambatan mental yang ada dalam diri mereka
- e. Proses pemberdayaan membutuhkan waktu dan energi dalam pendekatannya, karena bertujuan menangkap pikiran dan hati orang.³⁶

Dalam pemberdayaan rakyat harus kompak dan adanya arahan yang jelas dari pimpinan, ke mana dan bagaimana untuk mengatasi ini, serta jangan terlalu mudah mengadakan perubahan yang bersifat prinsip. Karena itu, diperlukan pemimpin yang tidak saja populis namun memiliki kemampuan baik sebagai leader maupun manajer.

Pemberdayaan di era global membutuhkan kekuatan moral baik dari pemimpin maupun masyarakat. Diperlukan keseimbangan dalam aspek-aspek wawasan global, kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan. Serta perubahan culture set dari konsumtif ke produktif.

³⁶*Ibid.*, hlm 100.

3. Kegiatan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan nyata yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas hidup umat. Kegiatan ini merupakan modal empiris pemberdayaan perilaku individu dan kolektif dalam dimensi amal saleh dengan titik tekan pada pemecahan masalah-masalah yang dihadapi terutama masalah ekonomi. Adapun kegiatan ini meliputi :

- a. Penyampaian konsep mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
- b. Penggalangan ukhuwah Islamiyyah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
- c. Menjalani dan mewujudkan berbagai MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
- d. Riset potensi lokal, pemberdayaan potensi lokal, dan pemberdayaan swadaya masyarakat.
- e. Katalisasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- f. Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.
- g. Mendampingi penyusunan rencana dan aksi sosial pelaksana rencana dalam rangka pemberdayaan komunikasi institusi Islam.
- h. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan umat.
- i. Melaksanakan stabilisasi kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.³⁷

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat, meliputi : Sosialisasi konsep kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan,

³⁷Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 29.

penggalangan ukhuwah Islamiyyah lembaga umat dan kemasyarakatan, menjalin dan mewujudkan berbagai MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai kekuatan masyarakat, riset potensi lokal, pemberdayaan potensi lokal, dan pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat, katalisasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan, mendampingi penyusunan rencana dan aksi sosial pelaksana rencana, memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan umat, melaksanakan stabilisasi kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.

Kalau merujuk kepada apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat, setidaknya harus ditempuh tiga tahap atau proses pemberdayaan masyarakat, yakni takwin, tanzim dan taudi'.³⁸

Sasaran pada tahap takwin adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat, kemudian mengekspresikannya dalam ghirah dan sikap pembela keimanan dari tekanan struktural amala al-Mutrafin (para penindas). Sasaran dalam tahap tanzim adalah pembinaan dan penataan masyarakat. Pada fase ini internalisasi Islam muncul dalam bentuk institusionalisasi Islam secara konfrehensif dalam realitas sosial. Tahap taudi' adalah tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini umat Islam siap menjadi masyarakat mandiri terutama secara manajerial.

Upaya mengarahkan perubahan ekonomi masyarakat dilakukan dalam rangka menciptakan etos kerja sekaligus motivasi kerja yang tinggi di kalangan masyarakat, sebaik apapun langkah yang ditempuh tanpa adanya upaya yang tepat dalam mengarahkan perubahan hasilnya kurang efektif. Mengarahkan perubahan masyarakat hubungannya dengan kesiapan masyarakat dan menerima dan memahami setiap program pengembangan yang ditawarkan sebagai alternatif model pemecahan masalah ekonomi.

³⁸*Ibid.*, hlm 31.

Prinsip kerja yang harus diperhatikan adalah :

- a. Mesti mewujudkan persahabatan dan kepercayaan dengan orang-orang yang akan dipengaruhinya
- b. Harus memperoleh persetujuan rakyat mengenai perubahan apa yang akan dilaksanakan
- c. Harus memperhatikan bahwa perubahan yang dirasakan itu adalah tidak membahayakan kepentingan masyarakat
- d. Harus menyukai kerja kelompok.³⁹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja yang harus diperhatikan oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa adalah : menekankan persahabatan dan kepercayaan dengan orang-orang desa. Sebelum melakukan aktivitas sebaiknya meminta persetujuan rakyat mengenai apa yang akan dilaksanakan. Meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan masyarakat justru sebaliknya. Menekankan kerja kelompok dengan lebih banyak melibatkan masyarakat.

Salah satu tuntutan yang penting agar petugas (pelaksana program PNPM Mandiri) bisa bekerja efektif dengan masyarakat adalah “mereka sendiri harus memahami dengan jelas tentang problem masyarakat desa itu sendiri”⁴⁰

Cara-cara yang diuraikan di atas, merupakan petunjuk penting dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat muslim. Kenyataannya memang dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan yang umumnya masih tradisional membutuhkan sikap yang sangat hati-hati dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Pengembangan ekonomi Masyarakat.

³⁹A. Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 20-25.

⁴⁰A. Suryadi, *Dakwah Islam dengan Pembangunan Masyarakat*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 141.

4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Kelompok

Pemberdayaan Masyarakat pada matra ekonomi yang kemudian diakui sering kali menimbulkan masalah. Solusi atas persoalan tersebut adalah dengan melembagakan kegiatan ekonomi melalui kegiatan kelompok masyarakat di desa. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat, prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh pelaksana dilapangan sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus integral meliputi mental spiritual materiil dalam segala aspek hidup dan kehidupan.
- b. Pembangunan harus merupakan swadaya dan kegotong royongan masyarakat sendiri, dengan bantuan minimal dari luar.
- c. Pembangunan dilaksanakan atas dasar *two way traffic* antara rakyat dengan pemerintah.
- d. Pembangunan merupakan usaha yang terus menerus (*on going process*) yang meningkat terus (*an ever increasing standar of living*).
- e. Pembangunan didasarkan atas kebutuhan terasa (*felt needs*) masyarakat.
- f. Pembangunan dilaksanakan dengan kaderisasi (*kader forming*).⁴¹

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa dalam pembangunan ekonomi masyarakat, prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan adalah : pembangunan ekonomi harus integral meliputi mental spiritual materiil, menumbuhkembangkan swadaya dan kegotong royongan masyarakat sendiri, dengan bantuan minimal dari luar. Pembangunan dilaksanakan atas dasar dua keinginan dan dua tujuan yang sama antara rakyat dengan pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang terus menerus dan mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Pembangunan ekonomi harus diutamakan atas atas

⁴¹A. Surjadi, *Op.Cit.*, hlm 38-46.

kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat, pembangunan dilaksanakan dengan kaderisasi artinya tidak terjadi monopoli pelaku pembangunan baik oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

Selain itu dalam pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai subjek dan objek utama pembangunan, maka prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah :

- a. Prinsip kebutuhan adalah program pembangunan masyarakat pedesaan terutama didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan dan dirasakan masyarakat
- b. Prinsip partisipasi menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dan lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pelayanan masyarakat di dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pembinaan, penilaian dan pembangunan.
- c. Prinsip keterpaduan mencerminkan adanya upaya untuk memadukan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan masyarakat
- d. Prinsip berkelanjutan menegaskan bahwa pembangunan masyarakat tidak dilakukan sekali tuntas melainkan secara bertahap, terus menerus dan terarah untuk mencapai kondisi yang lebih baik
- e. Prinsip keserasian mengandung makna bahwa program pembangunan masyarakat memerlukan perhatian keserasian antara kebutuhan yang dirasakan oleh anggota masyarakat dengan kebutuhan lembaga-lembaga terkait sehingga terdapat kaitan erat antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah
- f. Prinsip kemampuan sendiri menegaskan bahwa kegiatan pembangunan masyarakat disusun dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat

- g. Prinsip kaderisasi memberi arah bahwa penyelenggaraan pembangunan masyarakat apabila kader-kader pembangunan disiapkan dan dibina selama proses pembangunan berlangsung.⁴²

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pembangunan masyarakat dengan melihat masyarakat sebagai pelaku dan objek dari pembangunan, maka harus memperhatikan prinsip : Kebutuhan terutama didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan dan dirasakan masyarakat.

Prinsip partisipasi menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dan lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pelayanan masyarakat. Prinsip keterpaduan mencerminkan adanya upaya untuk memadukan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan masyarakat. Prinsip berkelanjutan artinya pembangunan tidak dilakukan sekali tuntas namun perlu waktu dan sifatnya yang berkelanjutan. Prinsip keserasian artinya pembangunan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dengan lembaga terkait sebagai motivator pembangunan. Prinsip kemampuan menekankan bahwa harus sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat. Prinsip kaderisasi memberi arah kader-kader pembangunan terus menerus disiapkan dan dibina selama proses pembangunan berlangsung.

Prinsip kerja yang harus diperhatikan adalah :

- a. Mesti mewujudkan persahabatan dan kepercayaan dengan orang-orang yang akan dipengaruhinya
- b. Harus memperoleh persetujuan rakyat mengenai perubahan apa yang akan dilaksanakan
- c. Harus memperhatikan bahwa perubahan yang dirasakan itu adalah tidak membahayakan kepentingan masyarakat

⁴²Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Agustus, 2000, hlm 79-81.

- d. Harus menyukai kerja kelompok.⁴³

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja yang harus diperhatikan oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa adalah : menekankan persahabatan dan kepercayaan dengan orang-orang desa.

Sebelum melakukan aktivitas sebaiknya meminta persetujuan rakyat mengenai apa yang akan dilaksanakan. Meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan masyarakat justru sebaliknya. Menekankan kerja kelompok dengan lebih banyak melibatkan masyarakat.

Dalam tinjauan dakwah bil-hal pelaksanaan suatu proyek pemberdayaan masyarakat tahap-tahap pelaksanaannya, sebagai berikut :

- a. Penyatuan wawasan dan langkah-langkah kerja
- b. Prioritas Program
- c. Tenaga terampil/manager
- d. Sistem pengelolaan
- e. Mekanisme pengelolaan program
- f. Evaluasi
- g. Pelaporan.⁴⁴

Berdasarkan kutipan di atas pelaksanaan suatu proyek pemberdayaan masyarakat tahap-tahap pelaksanaannya, adalah : Penyatuan wawasan dan langkah-langkah kerja di intern organisasi pelaksana dan pelaksana dengan masyarakat, menentukan dan menjalankan prioritas program yang disetujui bersama. Menempatkan tenaga terampil/manager yang sesuai dengan bidang keahliannya dan

⁴³A. Surjadi, *Op.Cit.*, hlm 20-25.

⁴⁴Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Dakwah Bil Hal*, Jakarta, 1987/1988, hlm 36-49.

disepakati atau disenangi oleh masyarakat setempat, menentukan sistem pengelolaan program yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Melakukan mekanisme pengelolaan program dan evaluasi serta pelaporan.

C. Kemiskinan di Pedesaan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan juga mempunyai banyak pengertian, di antaranya :

- a. Sar A. Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang di butuhkan untuk mencapai suatu standart hidup yang layak
- b. Bradley R.Schiller mendefinisikan kemiskinan ketidak sanggupaan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.
- c. Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok⁴⁵

John Friedmaan secara rinci mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamarataan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial itu meliputi :

- a. Modal yang produktif atas aset, misalnya : tanah perumahan, peralatan dan kesehatan.
- b. Sumber keungan seperti income dan kredit yang memadai.
- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti partai politik, atau koperasi.
- d. Jaringan sosial untuk memperoleh perkerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan memadai dan

⁴⁵L Laesyendecker, *Tata perubahan dan ketimpangan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 14

e. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.⁴⁶

Jadi, kemiskinan adalah suatu kekurangan dan ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang pokok yang berupa (papan, sandang, pangan) dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan sosial yang terbatas untuk mencapai standar hidup yang layak, sehingga mereka yang berada dalam garis kemiskinan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Dan kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan, kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat.

Pemetaan ekonomi adalah salah satu masalah besar dalam ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Setiap pemerintah negara manapun berusaha untuk mengatasinya, namun tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah itu tergantung mekanisme dari sistem ekonomi yang dianut negara tersebut. Kemiskinan sebagai gejala sosial adalah muncul sama tuanya dengan usia manusia, namun demikian kemiskinan akan tetap menjadi pembicaraan terus menerus selama masih ada manusia. Al-Qur'an telah memberikan peringatan kepada umat manusia.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya : 1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6.

⁴⁶Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembanguna Desa*, Aditya Media, Yogyakarta, 1966, hlm 7

orang-orang yang berbuat riya 7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.⁴⁷

Surat Al-Ma'un ayat 1-7 menunjukkan bahwa kemiskinan itu ada semenjak manusia itu ada. Orang yang mengaku beragama dan sholat tetapi tidak ingin menolong orang yang lemah dan miskin adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implisit peringatan tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidak miskinian akan selalu ada agar umat manusia saling tolong menolong.⁴⁸

Seperti yang dirangkum oleh Hamdar Arraiyyah ada beberapa term yang berkaitan dengan pengertian miskin dalam terminologi Islam, antara lain :⁴⁹

1. *Al-Maskanat*

Menurut Al-Raghib Al-Ashfahaniy kata *al-maskanat* dari segi bentuknya, termasuk *al-shifat almusyabbahat* (kata yang menunjukkan keadaan dan tidak terikat dengan waktu) dan menunjukkan pada orang yang tidak mempunyai harta benda. Kata ini dibentuk dari fi'il madhi (kata kerja bentuk lampau) *sakana* yang berarti diamnya sesuatu sesudah bergerak, dan bertempat tinggal. Bentuk masdamnya adalah *maskanat* (kemiskinan). Pemakaian kosakata miskin, al-Qur'an lebih banyak menggunakan kata sifat atau orang yang menyandang sifat itu dibanding menggunakan masdar atau kata benda yang menunjukkan perihal miskin. Al-Qur'an banyak menyoroti kemiskinan sebagai persoalan manusia atau sifat yang berhubungan dengan diri manusia. Pengertian kata miskin dari segi leksikal sebagaimana dikemukakan di atas mengacu pada dimensi ekonomi atau kemiskinan materi.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Mahkota, Surabaya, Edisi Revisi, 1996, hlm 976

⁴⁸Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, UMM pers, Malang, 2005, hlm 353

⁴⁹Arraiyyah, M. Hamdar, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 12-43

2. *Al-Faqr*

Menurut Dar al-Masyriq, *Al-Faqr* termasuk jenis *ism* (kata benda) bentuk *masdar*. Artinya kemiskinan. Kata kerja bentuk lampaunya adalah *faqura*. *Al-Faqir* (jamaknya *faqara*) termasuk jenis kata sifat (*al-shifat almusyabbahat*), berarti miskin. Jenis kata yang disebut terakhir menunjuk kepada melekatnya sifat pada pemiliknya secara mutlak, tidak terikat oleh waktu seperti keterikatan *isim fa'il* (kata benda yang menunjukkan pelaku). Sebutan lengkapnya *al-shifat al-musyabbahat bi ism al fa'il* (kata sifat yang dianggap serupa dengan kata benda yang menunjuk pelaku). Dari segi etimologi, *al-faqir* berarti orang yang patah tulang belakangnya. Kata ini kemudian dipergunakan untuk orang miskin. Ia seolah-olah patah tulang belakangnya karena kemiskinan dan kesengsaraan. Dengan demikian, kemiskinan yang ditunjukkan oleh kata *al-faqr* mengarah kepada segi material.

3. *Al-'Ailat*.

Menurut Al-Raghib Al-Ashfahaniy *Al-'Ailat* adalah kata benda bentuk *masdar* yang berarti kemiskinan. Kata kerja bentuk lampaunya adalah *'ala* (mengalami kemiskinan). Kata benda yang menunjukkan kepada penyandang kemiskinan (*ism al-fa'il*) disebut *fa'il*.

4. *Al-Ba'sa*

Kata *Al-Ba'sa* terambil dari kata *al-bu's* (bentuk *masdar*) dan berarti kesulitan karena kemiskinan. *Al-Bu's*, menurut Al-Zakariya berarti kesulitan dalam penghidupan. Kata kerja lampaunya adalah *bausa*. *Al-Ba'sa* dikemukakan dalam 4 gagasan pokok, yaitu: (1) bersabar dalam kesempitan dan penderitaan merupakan salah satu unsur dari *al-birr* (kebajikan), (2) malapetaka dan kesengsaraan merupakan cobaan bagi calon penghuni surga sebagaimana hal itu telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, (3) kesengsaraan dan kemelaratan yang ditimpakan kepada umat terdahulu dimaksudkan agar mereka itu memohon kepada Allah dengan merendahkan diri, (4) kesempitan dan penderitaan merupakan ujian yang selalu menyertai kedatangan seorang rasul Allah kepada penduduk negeri yang

mendustakan kedatangannya agar mereka itu tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah.

5. *Al-Imlaq*

adalah kata benda bentuk *masdar*. Kata kerja bentuk lampayanya *amlaq*. Artinya menghabiskan harta benda sehingga menjadi orang yang kekurangan. Dengan demikian, dari segi leksikal, kemiskinan yang ditunjuk oleh kata itu terikat dengan tindakan manusia berkenaan dengan harta benda.

6. *Al-Sail*.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Hamdar Arraiyyah, 2007: 34) *Al-Sail* adalah *ism al-fa'il* (kata benda yang menunjuk kepada pelaku perbuatan). Ia terbentuk dari kerja *saala* yang artinya meminta kebaikan atau sesuatu yang dapat membawa kepada kebaikan, meminta harta atau sesuatu yang dapat menghasilkan harta. Jadi dari segi leksikal, *al-sail* adalah orang yang meminta sesuatu, baik itu immaterial seperti informasi atau berupa materi seperti upah atau uang.

7. *Al-Mahrum*.

Menurut Dar Al-Masyriq. Kata ini merupakan bentuk *ism maf'ul* (kata benda yang menunjukkan objek) yang berarti orang yang terlarang untuk memperoleh kebaikan atau harta. Ia terbentuk dari kata kerja bentuk lampau *huruma* yang artinya terlarang. Bentuk masdarnya *haram*. Bentuk jamak dari *al-mahrum* yakni *muhrumun*. Dalam AlQur'an, kata ini dipergunakan dalam arti orang yang dilarang untuk memperoleh hasil kebunnya, atau tidak mendapatkan hasil sama sekali. Jadi, pemakaian kata ini dalam bentuk jamak tidak menunjukkan kepada arti miskin, namun menunjuk pada keadaan yang serupa dengan apa yang dialami oleh orang miskin yang tidak mendapatkan apa-apa

8. *Al-Qani*.

Menurut Al-Raghib Al-Ashfahaniy *Al-Qani* adalah kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Ia bias dibentuk dari kata bentuk lampau *qani'a* yang berarti merasa senang dan bisa dari *qana'a* yang berarti meminta. Menurut sebagian ahli bahasa, *al-qani* adalah

meminta yang tidak nyinyir dan merasa senang dengan apa yang diperoleh. Yusuf 'Ali mengemukakan bahwa dalam mengemis itu ada etika, seperti halnya berderma. Meminta dengan cara yang congkak dan kurang sopan tidak dibenarkan, meskipun segala macam kesukaran itu, baik yang wajar maupun yang tidak semestinya perlu diberi uluran tangan. Akan tetapi, mereka yang meminta dengan rendah hati dan mereka yang menerima pemberian dengan rasa terima kasih dan kepuasan hati mendapat perhatian khusus.

9. *Al-Mu'tarr*.

Menurut Mahmud Hijazay *Al-Mu'tarr* berarti orang miskin yang datang meminta. Ia sama dengan alqani selaku penyandang kemiskinan, namun berbeda dari segi penampilan lahiriahnya. Untuk mendapatkan apa yang dicari, ia mendatangi seseorang dengan cara meminta atau diam. Pemakaian kata *al-mu'tarr* dengan pengertian seperti disebutkan di atas ternyata lebih luas dari pengertian leksikalnya, yaitu orang yang datang untuk mendapatkan sesuatu yang lazim dikenal dari orang lain tanpa meminta.

10. *Al-Dha'if* dan *Al-Mustadh'at*

Menurut Al-Raghib Al-Ashfahaniy *Al-Dha'if* adalah *al-shifat al-musyabbahat* yang berarti lemah atau orang lemah. Ia dibentuk dari kata kerja lampau *dha'ufa* yang artinya menjadi lemah. Bentuk masdarnya *al-dha'f* berarti kelemahan atau antonim dari kekuatan. Kelemahan bisa terjadi pada jiwa, fisik, dan keadaan.

Salah satu hal yang ditekankan al-Qur'an dalam membicarakan tentang kemiskinan ialah perlunya membantu mereka yang mengalami kemiskinan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Penekanan ini tampaknya bertujuan: (1) untuk menjaga kelangsungan hidup orang miskin dan membantu mereka untuk menanggulangi kesulitan hidup yang dialami, (2) untuk menghindarkan mereka dari perbuatan yang tercela karena pengaruh kemiskinan. Kedua hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia lahir dan batin, materiil dan spiritual, dunia dan akhirat.⁵⁰ Firman Allah SWT :

⁵⁰*Ibid.*, hlm 52

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ
 نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ
 بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَيْنَا آلِيقِينِ ﴿٤٧﴾

Artinya : 42. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? 43. mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, 44. dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin, 45. dan adalah Kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, 46. dan adalah Kami mendustakan hari pembalasan, 47. hingga datang kepada Kami kematian". (QS : Al-Mudatsir ayat 42-47).⁵¹

Ayat di atas mengemukakan sebab-sebab dicampakkannya segolongan manusia ke dalam neraka di hari kemudian kelak. Salah satu dari sebab-sebab itu karena mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang yang hidupnya melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus ditegakkan. Perintah ini mempunyai kedudukan yang penting seperti halnya perintah agama kepada manusia agar menegakkan shalat atau menyembah Tuhan.

Menurut Quraish Shihab perintah "memberi makan" kepada orang miskin hendaknya dipahami bukan sekedar pemberian pangan, tetapi mencakup segala macam bantuan, demikian pula kata "miskin" tidak hanya terbatas pengertiannya pada "orang yang tidak memiliki biaya hidup cukup".⁵²

Allah sudah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana tersurat dalam sural Al-Ma'un. Dalam sisi *supply*, Allah mengajarkan muslim yang miskin untuk

⁵¹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 862

⁵²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Amanah*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1992, hlm

optimis dalam berusaha mencari risqi sebagai motifikasi meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

Tentang rizqi yang berbeda antar manusia sebagai peredam kecemburuan sosial dan terhadap golongan kaya. Dalam sisi *demand*, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, seperti zakat, infaq, sedekah dan usaha pemerintah lain seperti kharaj bagi kafir zimmi dan pembagian harta *fa'i*. Mekanisme ini sanggup merendam kecemburuan sosial dan mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.⁵³

Islam berusaha menghilangkan kemiskinan dengan berbagai ketentuan dan aturan. Dengan berbagai cara, ia berupaya mengentaskan umat manusia dari lemah kemelaratan. Menurut pandangan Islam, orang miskin bukanlah anggota strata kaum miskin yang diwarisi dari ayah, neneknya. Menurut keyakinan Islam, kemiskinan masyarakat bukanlah fakta yang baku dan abadi, melainkan situasi sementara. Orang-orang miskin hari ini bisa saja menjadi kaya pada esok hari. Semua pihak dalam masyarakat Islam memiliki kesempatan luas menjadi orang kaya tanpa membedakan status sosial.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur : 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : 32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

⁵³Mohammad Nur Rohani, Jurnal dan Makalah: *Kemiskinan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam*. 09 Juli 2001

⁵⁴Yusuf Qardhawi. *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 180.

jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁵⁵

Di dalam masyarakat Islam, kemiskinan tidak mengurangi harga diri seseorang, dengan kemiskinan itu haknya tidak akan hilang sedikitpun. Islam mengajarkan kepada pengikutnya bahwa harga diri tidak di tentukan oleh harta yang melimpah tetapi oleh ilmu, iman, taqwa serta amal sholeh.

2. Batasan dan Kategori Kemiskinan

Menurut jenisnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua katagori sebagai berikut:

- a. Kemiskinan relatif yakni perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relative karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial misalnya, membandingkan proporsi pendapatan nasional yang di terima oleh kelompok sosial tertentu dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Menurut kriteria Bank Dunia : (1) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan nasional yang sangat timpang, (2) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17% dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang, dan (3) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah.⁵⁶
- b. Kemiskinan absolut, yakni suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti : sandang, pangan, papan, pemukiman, dan pendidikan. Menurut kriteria Biro Pusat Statistik (BPS) dengan menghitung pengeluaran rumah tangga untuk kosumsi berdasarkan data survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) diterapkan batas garis

⁵⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit*

⁵⁶Abu Hurairah, *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasisi Rakyat*, Humaniora-Anggota IKAPI, Bandung, 2008, hlm 168

kemiskinan absolut adalah setara dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2.100 kalori per orang, beberapa kebutuhan non makanan lain, seperti sandang, pangan, papan, jasa dan lain-lain.⁵⁷

Pada tahun 1971, Sajogyo mengusulkan cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut. Cara yang dikembangkan adalah memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang miskin, yaitu golongan orang yang paling miskin yang mempunyai pendapatan per kapita, pertahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan orang miskin sekali yang memiliki pendapatan per kapita pertahun beras sebanyak 240 hingga 360 kg, dan lapisan miskin yang memiliki pendapatan beras per kapita per tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang lebih dari 480 kg, meskipun upaya yang dilakukan oleh sayogyo pada akhirnya menimbulkan perdebatan, namun dia telah berjasa dalam meletakkan standar obyektif pengukuran garis kemiskinan.⁵⁸

Menurut Kartasmita sebagaimana dikutip Nanik Sudarwati bahwa bentuk-bentuk kemiskinan terdiri dari tiga kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, hanya dapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Revisond baswir kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut kartasmita disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah terisolir.
- b. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup,

⁵⁷Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, hlm 2

⁵⁸Abu Hurairah *Op.Cit.*, hlm 169

kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tidak ingin berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Revisond baswir bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lain

- c. Kemiskinan struktural menurut Revisond baswir kemiskinan yang di sebabkan ooleh faktor-faktor buatan manusia, yaitu seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.⁵⁹

Selanjutnya Gunawan Sumodinigrat mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaan tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, sehingga menimbulkan struktural masyarakat yang timpang. Menurut kartasimita hal ini disebut "*accidental poverty*" yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan dalam Islam disebutkan terlebih dahulu oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Israa ayat 30:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

⁵⁹Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan mengurangi kegagalan penanggulangan kemiskinan*, Intimedia, Malang, 2009, hlm 26

⁶⁰Gunawan Sumodinigrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 69.

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.⁶¹

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فِي الرِّزْقِ فَضَّلُوا بَرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?⁶²

Pada ayat-ayat ini dinyatakan adanya perbedaan perolehan antara satu manusia dengan lainnya dalam hal harta benda. Bentuk ungkapan itu tidak mempertentangkan antara kaya dengan miskin, atau lapang dengan sempit. Diisyaratkan, perbedaan itu bisa jadi dalam bentuk kaya dan miskin dan bisa jadi pula menunjuk kepada adanya beberapa peringkat orang kaya dan peringkat orang miskin. Sejumlah peringkat orang kaya bentuk stratifikasi sosial dari sudut pandangan ekonomi.

Al-Qur'an mengakui keanekaragaman kapasitas dan bakat pada diri manusia, dan sebagai konsekuensinya mengakui keanekaragaman penghasilan dan imbalan material. Dalam hubungannya dengan ayat di atas, ia menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak mengakui kesamarataan dalam pembagian kekayaan karena hal ini akan menghilangkan tujuan keanekaragaman dan juga berarti penyangkalan terhadap karunia Allah. Maksudnya, keanekaragaman tingkat perolehan manusia timbul karena adanya keanekaragaman dari apa yang dimiliki dan diusahakan oleh masing-masing individu.

⁶¹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm 108

⁶²*Ibid.*,

Kemiskinan yang melanda seseorang tidaklah berarti bahwa ia dibenci oleh Tuhan. Sebaliknya, kekayaan yang dianugerahkan kepada seseorang tidak pula berarti bahwa ia dikasihi oleh Tuhan. Kekayaan ataupun kemiskinan merupakan ujian Tuhan bagi manusia. Manusia yang sabar dalam menghadapi kesulitan hidup akan dikasihi oleh Tuhan. Demikian pula halnya bagi manusia yang bersyukur tatkala diberi nikmat, ia akan dikasihi oleh Tuhan. Orang kaya maupun orang miskin sama-sama berpeluang untuk mendapatkan ridha Allah melalui iman dan amal saleh.

Menurut Al- Maududi, untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan digunakan dan diterapkan adalah sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Berusaha dan bekerja dengan mengindahkan yang halal dan haram tidak membenarkan bagi para pemeluknya untuk mencari kekayaan semau mereka dengan jalan apa saja yang mereka kehendaki. Namun dalam Islam dijelaskan perbedaan antara jalan yang sah dan jalan yang tidak sah menurut agama.
- b. Larangan Menumpuk Harta. Yang kedua, ialah seyoganya orang tidak mengumpulkan harta yang meskipun di dapatnya dengan jalan sah, karena akan menghambat perputaran (distribusi) kekayaan dan merusak keseimbangan serta pembagiannya dikalangan masyarakat. Orang yang mengumpulkan harta dan tidak membelanjakannya, tidak hanya mencampakkan dirinya kedalam penyakit moral saja, tetapi juga melakukan sesuatu kejahatan besar terhadap masyarakat banyak, di mana mudlarat dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya sendiri juga.
- c. Zakat. Yang di kehendaki dalam Islam pada hakekatnya supaya kekayaan tidak dibiarkan berkumpul di salah satu tempat dalam masyarakat. Tidak selayaknya bagi orang-orang yang memperoleh kekayaan karena kebetulan nasib mereka baik atau karena kecakapan dan kecerdasan mereka, akan menyimpan dan tidak membelanjakan di jalan kebajikan. Namun wajib bagi mereka membelanjakan di jalan yang memungkinkan bagi mereka yang tidak mempunyai nasib

baik, akan memperoleh bagian yang cukup dari kekayaan masyarakat dalam distribisinya.

- d. Hemat. Islam memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat, dan ditentukannya satu bagian dari harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada fakir dan miskin pada satu sisi, dan pada sisi lain diperintahkannya kepada tiaptiap individu dalam mengeluarkan hartanya (pembelajaan), hingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena kelalaian dan keterlaluhan individu-individu dalam mempergunakan kekayaan mereka.⁶³

Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. Masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya-sumber daya kunci yang di butuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Akibatnya mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial, dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka.

Proses ini berlangsung timbal balik saling terkait dan saling mengunci dan akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Situasi ini bila tidak segera di tanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin yang ditandai dengan lemahnya etos kerja, rendanya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan

⁶³Abu A'la al-Maududi, *Dasar dasar ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem masa Kini*, Al-Ma'arif, Bandung , 1980, hlm. 116-137

dalam rangka jalan pintas mempertahankan hidup mereka yang bila berlarut akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas.⁶⁴

Kemiskinan di sebabkan oleh ketimpangan dan kesenjangan sosial. Dalam kaum kapitalis berhasil mengutamakan nilai-nilai ekonomi dari pada nilai yang lainnya, seperti nilai politik Mereka dengan luasa memperkerjakan kaum proletar (kaum buruh) dengan semena-mena. Dari berbagai macam kesenjangan yang ada dalam kehidupan sosial yang membuat para kaum miskin semakin miskin dan orang-orang yang ada di tingkat yang paling atas (orang kaya) semakin makmur.⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagong Suyanto pada tahun 1995, ada lima faktor yang disinyalir menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan maupun diperkotaan tetap mencolok, yakni:

- a. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurang tersedia modal yang cukup untuk usaha.
- b. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dalam arti mereka relatif terisolir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit, tidak berdaya dan rentan.⁶⁶

Said Rusli, menjelaskan mengidentifikasi golongan miskin dapat dikaitkan dengan permasalahan berikut:

⁶⁴*Ibid.*, hlm 33

⁶⁵Sri Edi Suwarsono. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan : Dari Cedikiawan Tentang Islam* UI Press, Jakarta, 1987, hlm 24

⁶⁶Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, hlm 49

- a. Kekurangmampuan meraih peluang ekonomi: peluang bekerja, upah rendah, malas bekerja, dan sebagainya.
- b. Penguasaan aset produksi yang rendah : lahan, air, faktor produksi dan jangkauan pelayanannya.
- c. Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan sandang.
- d. Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah.
- e. Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh.
- f. Kekurangmampuan menyekolahkan anak.
- g. Kekurangmampuan meraih pelayanan kesehatan, air bersih dan keserasian lingkungan.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor dominan yang menyebabkan kemiskinan adalah terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial, tidak mampu meraih peluang ekonomi, peluang bekerja, bekerja tetapi dengan upah rendah dan malas bekerja dengan etos kerja yang sangat rendah.

D. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

1. Pengertian PNPM

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.⁶⁸

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis

⁶⁷Ninik Sudarwati, *Op. Cit.*, hlm 23

⁶⁸Pedoman PNPM-Mandiri Pedesaan tahun 2013, Jakarta, 2014, hlm 2.

pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Tujuan PNPM Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah salah satu program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat kelembagaan masyarakat setempat dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

3. Dasar Hukum dan Prinsip Dasar PNPM Pedesaan

Dasar hukum pelaksanaan PNPM MP, mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM MP, yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan

keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM MP. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM MP. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
- g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

- h. **Transparansi dan Akuntabel.** Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative.
- i. **Prioritas.** Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- j. **Keberlanjutan.** Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.
- k. **Prinsip PNPM MP diatas dianggap mewakili undang-undang yang baru akan dibuat kemudian.** Sehingga yang dibuat landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan di ambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM MP adalah prinsip atau nilai-nilai dasar yang telah ada pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO).⁶⁹

4. Pendanaan dan Mekanisme Pencairan PNPM Pedesaan

PNPM MP merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM MP Sumber dana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

⁶⁹Tim penyusun *Pedoman Umum PNPM Mandiri*, TK PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

c. Swadaya masyarakat Partisipasi dunia usaha

Adapun Kriteria Alokasi dana PNPM Pedesaan adalah per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin.

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu,
- b. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah
- c. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen PMD, Depdagri
- d. Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan.
- e. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN.
- f. Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus untuk tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan untuk memahami Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan di desa Sabah Balau, dalam kaitan fenomena sosial dan pandangan pelakunya. Penelitian kualitatif menjadi dasar bagi penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan ilmiah. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengandalkan manusia sebagai instrument penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk menjabarkan dan mengarahkan sasaran penelitian sebagai “usaha menemukan teori, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membahas studi dengan fokus rancangan penelitian disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian).⁷⁰

Penelitian ini berusaha memahami dan menjelaskan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan ekonomi Masyarakat miskin di desa Sabah Balau sebelum dan sesudahnya. Atas dasar itu, diperlukan pemahaman mengenai teori, konsep pemikiran yang berkaitan dengan PNPM Pedesaan dan penanggulangan kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis.

Jelasnya, kompleksitas persoalan kemiskinan tidak hanya untuk “diketahui” tetapi lebih dan itu harus “difahami” berdasar realitas sosial yang diteliti. Dan itu, mengapa dipilih penelitian kualitatif, karena adanya kesesuaian permasalahan dengan rencana penelitian lapangan yang akan dilakukan. Menurut seorang pakar penelitian kualitatif: Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dan pada hasil, memilih seperangkat

⁷⁰Sugiyono, *Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm 7.

criteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian”.⁷¹

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif, secara konseptual penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mempelajari masalah-masalah nyata yang terjadi mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat, tata cara atau mekanisme kerja para pelaku pemberdayaan masyarakat yaitu aparatur desa Sabah Balau, termasuk kegiatan kelembagaan lainnya, sikap dan gaya pemimpin desa dalam kehidupan masyarakat, perilaku, pandangan, proses, hubungan sosial dan pengaruh dan suatu kebijakan.

Dalam penelitian deskriptif memang tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan seperti yang dapat ditemui dalam penelitian eksperimen. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi apa yang ada dalam suatu situasi, dan biasanya tidak diarahkan untuk merumuskan hipotesis. Metode ini berfikir tanpa prasangka dan tidak bertitik tolak pada teori atau pandangan tertentu. Tetapi teori dimanfaatkan untuk membantu menghubungkannya dengan data, baik dalam pengumpulan data hingga analisisnya.

Pemilihan penelitian kualitatif yang bersifat survey dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapat informasi yang mendalam dan mencakup tentang realitas sosial yang difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM Pedesaan tahun 2019 – 2020. Semua itu dilakukan agar dapat menjawab ketertarikan terhadap permasalahan yang dikaji. Menurut pakar metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan, dan oaring-orangan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.⁷²

⁷¹*Ibid.*, hlm. 4.

⁷²Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 9.

B. Lokasi dan Sumber Data Penelitian

Berdasar metode, jenis dan pendekatan penelitian kualitatif, maka lokasi dipilih secara sengaja (purposive) agar menemukan permasalahan yang tepat dilapangan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Sabah Balau kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Oleh karena itu fokus penelitian yang dijadikan sasaran adalah perangkat desa dan masyarakat yang aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri pedesaan dalam rangka peningkatan ekonomi msasyarakat didaerah setempat.

Sumber data dalam penelitian merupakan keseluruhan objek yang diteliti, yaitu aparatur desa Sabah Balau dan kelompok masyarakat binaan. Populasi dipilih secara sengaja, yang didasarkan atas pertimbangan. (1) Permasalahan penerapan program PNPM Mandiri pedesaan dapat dikaji dan dipeoleh data primer maupun data sekunder yang mendukung penelitian ini dan Sumber informasi yang berkenaan dengan masalah dapat ditemui di lokasi penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian difahami sebagai cara melakukan penelitian ilmiah yang terstandar, sistematik serta logis. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi agama dan pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka teori guna menjelaskan efektivitas, faktor pendorong dan penghambat program PNPM Pedesaan di desa Sabah Balau.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan itu, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Menghimpun data-data tertulis berdasar studi kepustakaan, journal penelitian dan berita-berita dan media masa.
- b. Pengamatan atau observasi langsung terhadap upaya pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri Pedesaan.

- c. Wawancara mendalam dan terstruktur ditetapkan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sebagai studi deskriptif kualitatif penerapannya menggunakan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara sengaja.
- d. Dokumentasi berdasar data dan organisasi sosial atau lembaga pengelolaan program PNPM Mandiri.

Mengenai langkah-langkah penelitian diantaranya dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. Observasi partisipasi
- b. Wawancara mendalam
- c. Penelitian dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan atau dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam.

D. Metode Analisis Data

Pelaksanaan analisis data diawali dan menentukan unit analisis, yaitu aktivitas aparatur desa Sabah Balau, pengurus atau anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok bina desa. Unit analisis alam penelitian ini bukan hanya individu tetapi juga kelompok, organisasi dan lembaga yang dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi, unit analisis dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Analisis data dilakukan baik sewaktu mengumpulkan data maupun setelah pengumpulan data selesai, yang kegiatannya diawali dan pengumpulan data, muatannya, membagikan menjadi suatu pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dipelajari serta memutuskan pula apa yang akan dilaporkan. Hal itu dimaksudkan untuk memahami arti dan penafsiran data sebagai cara menjelaskan dan membandingkan kaitan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri

dengan kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Abu A'la al-Maududi, *Dasar dasar ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem masa Kini*, Al-Ma'arif, Bandung, 2010
- Abu Hurairah, *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasisi Rakyat*, Humaniora-Anggota IKAPI, Bandung, 2008
- Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, Utama, 2000
- Arraiyyah, M. Hamdar, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembanguna Desa*, Aditya Media, Yogyakarta, 1966
- BPS, *Indonesia dalam Angka*, Jakarta, 201
- David Korten, *Menuju Abad 21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Dakwah Bil Hal*, Jakarta, 1987/1988
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Mahkota, Surabaya, Edisi Revisi, 1996
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan, Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI PERDESAAN*, penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta, 2018
- Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT Pusaka Cisendo, Jakarta, 1996

- Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT Pusaka Cisendo, Jakarta, 1996
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, HUP, Bandung, 2004
- Hidayat, S. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : sebuah rekonstruksi konsep CBD*. PT. Pustaka Quantum, Jakarta, 2001
- Ishomuddin, *Sosiologi Perpektif Islam*, UMM pers, Malang, 2005
- Laesyendecker, *Tata perubahan dan ketimpangan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Meleong Lexy, J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Nasikun, *Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, dalam Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996
- Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan mengurangi kegagalan penanggulangan kemiskinan*, Intimedia, Malang, 2009
- Nur Rohani, *Jurnal dan Makalah: Kemiskinan Dalam Pespektif Sistem Ekonomi Islam*. 09 Juli 2001
- Pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun 2013, Jakarta, 2014
- Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Fokus Media, Bandung, 2009
- Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2007
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Amanah*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1992

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sonny H. Kusuma, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.17, No. 2, Juni 2002, Akatiga, Bandung, 2002
- Sri Edi Suwarsono. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan : Dari Cedekiawan Tentang Islam* UI Press, Jakarta, 1987
- Sugiyono, *Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Suprpto (dkk), *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Modal Sosial dan Potensi Ekonomi Lokal dalam Pengentasan Kemiskinan Pasca Program PNPM Mandiri*, Universitas Jenderal Soedirman - INDHILLCO, Purwokerto, 2018
- Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Suryadi, *Dakwah Islam dengan Pembangunan Masyarakat*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005
- Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, 2002
- Tim penyusun *Pedoman Umum PNPM Mandiri*, TK PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta, 2009
- Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Agustus, 2000
- Wardi Bachtiar, *Pengaruh Etos Kerja Terhadap Status Sosial Ekonomi Muslim Sunda Pemukiman Daerah Kumuh di Kota Madya Bandung*, Disertasi Unpad, Bandung, 1995
- Yusuf Qardhowi. *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995
- Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ar Ruzz Media, Jakarta, 2007